

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN SEWA LAHAN DI DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

Diyan Kartika

07011181621201

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

AGUSTUS 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN SEWA
LAHAN DI DISTRIK NAVIGASI KELAS I
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**


Oleh :

**DIYAN KARTIKA
07011181621201**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 2021

Pembimbing I

**Dra. Retno Susilowaty
NIP. 195905201985032003**



Pembimbing II

**Dra. Tutty Khairunnisa, MA
NIP. 196201051988032004**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN SEWA
LAHAN DI DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 09 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dra. Retno Susilowati, MM
Ketua

Dra. Tutv Kahrunnisvah, MA
Anggota

Ermanovida, S.Sos., M.Si
Anggota

Dwi Mirani, S.Ip., M.Si
Anggota



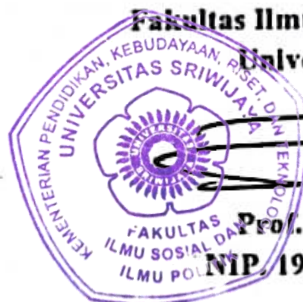







Indralaya, Mei 2022

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,**




Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diyan Kartika
NIM : 07011181621201
Tempat dan Tanggal Lahir : Banuayu, 18 Desember 1997
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 6 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,


Diyan Kartika

Motto

“Setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing, jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain yang terpenting tetap berusaha dan berdoa dengan sungguh.”

ABSTRAK

Latar belakang yang mendasari penelitian ini ialah permasalahan yang terjadi mengenai proses pembayaran uang sewa lahan yang tidak dilakukan oleh penyewa lahan selama beberapa waktu sehingga terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan pelaksanaan sewa lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan eksplanasi deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yang memiliki enam aktivitas penting sebagai pedoman untuk melihat apa yang telah dilakukan atau telah terlaksana dalam implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pelaksanaan sewa lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang belum terlaksana dengan baik karena masih memiliki kendala dalam proses pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelaksanaan Sewa, Lahan, Distrik Navigasi Kelas I Palembang

Pembimbing I



Dra. Retno Susilowaty, MM

195905201985032003

Pembimbing II

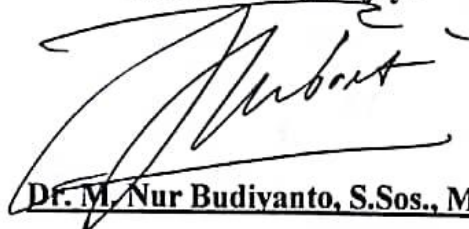


Dra. Tuty Khairunnisa, MA

196201051988032004

Indralaya, Juni 2022

**Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

196911101994011001

ABSTRACT

The background that underlies this research is the problem that occurs regarding the land rent payment process that has not been carried out by land tenants for some time so that there are several obstacles in the implementation of land lease implementation policies in the Class I Navigation District of Palembang. This study aims to determine the implementation process of the Land Lease Implementation Policy in the Class I Navigation District of Palembang. The method used in this research is a qualitative method with descriptive explanation. Sources of data used in this study are perimer data and secondary data obtained through observation, interview, and documentation collection techniques. The theory used in this research is the Van Metter and Van Horn policy implementation model theory which has six important activities as a guide to see what has been done or has been implemented in policy implementation, namely the size and objective of policies, resources, characteristics of implementing agents, attitudes the disposition of the implementers, inter-organizational communication and the activities of the executor as well as the social, economic and political environment. The results found in this study are the implementation of land lease implementation policies in the Class I Navigation District of Palembang has not been implemented properly because it still has obstacles in the implementation process.

Keywords: Policy Implementation, Lease Implementation, Land, Palembang Class I Navigation District

Advisor I



Dra. Retno Susilowaty, MM

195905201985032003

Advisor II



Dra. Tutu Khairunnisa, MA

196201051988032004

Indralaya, Juni 2022

Chairman of The Public Administration Departement

Faculty of Sosial and Political Science

Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang*”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua yaitu Ayah Ermedi dan Ibu Ani Suwita sebagai orang yang tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan selama perkuliahan serta selalu mendoakan. Terimakasih banyak atas dukungan dan bantuan baik secara materiil maupun nonmaterial.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya..
4. Ibu Dra. Retno Susilowaty, MM dan Ibu Dra. Tuty Khairunnisa, MA selaku Pembimbing penulis yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Adi Karsyaf, S.H., M.H selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang yang telah memberikan izin penelitian dan pengambilan data terkait penelitian skripsi ini.
6. Pegawai dan Staff Distrik Navigasi Kelas I Palembang terkhusus Bidang Logistik yang telah berkontribusi besar dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang dilakukan.
7. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung dan memberikan semangat dalam proses pelaksanaan penelitian skripsi ini.
8. The special people sekaligus sahabat penulis yaitu Suhadi yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menemani suka dan duka penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan. Saran dan kritik dari pembaca yang membangun sangat diharapkan penulis guna perbaikan. Selain itu penulis juga berharap bahwa penelitian skripsi ini dapat memberikan masukan, kajian dan literature mengenai kebijakan publik khususnya dalam hal ini mengenai Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Kebijakan Publik	8
2.1.2 Implementasi.....	10
2.1.3 Sewa.....	11
2.2 Teori Yang Digunakan	12
2.3 Alasan Memilih Teori	14
2.4 Penelitian Terdahulu	15
2.5 Kerangka Berpikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Definisi Konsep.....	18
3.3 Fokus Penelitian.....	19
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	21

3.5 Informan Penelitian.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Sejarah Distrik Navigasi Kelas I Palembang	29
4.1.2 Visi, Misi, 5 Citra Manusia Perhubungan, Nawa Cita, Maklumat Pelayanan, dan Jargon Pelayanan Distrik Navigasi Kelas I Palembang	30
4.1.3 Tugas dan Fungsi Distrik Navigasi Kelas I Palembang	32
4.1.4 Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	33
4.2 Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang	36
4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan	37
4.2.2 Sumber Daya.....	46
4.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana	59
4.2.4 Sikap atau Kecenderungan (disposition) para pelaksana	71
4.2.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	79
4.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	87

BAB V PENUTUP

5.1 Penutup	103
5.2 Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	107
---------------------	-----

LAMPIRAN.....	108
---------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	21
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	33
Tabel 4.2 Daftar Nama Pegawai Bidang Logistik Distrik Navigasi Kelas I Palembang....	47
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kartu Inventaris Barang.....	4
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	17
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	17
Gambar 4.2	Surat Ketentuan Sewa Lahan Stasiun Radio Pantai Penerima Jl. Residen Amaludin Palembang.....	39
Gambar 4.3	Peralatan Pendukung sebagai Sumber Daya Finansial Pengelola Barang.....	54
Gambar 4.4	Undangan Rapat Sewa Lahan Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	56
Gambar 4.5	Prosedur Struktur Birokrasi atau Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	62
Gambar 4.6	Foto Koordinasi Melalui Rapat Staf Bidang Logistik	70
Gambar 4.7	Suasana Lahan Tempat Berjualan di Stasiun Radio Pantai Penerima Jl. Residen Amaludin Palembang.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	109
Lampiran 2 Surat Balasan Konfirmasi Izin penelitian.....	110
Lampiran 3 Surat Tugas Pembimbing Skripsi	111
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	112
Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Proposal	113
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi.....	114
Lampiran 7 Pedoman wawancara	115
Lampiran 8 Undangan Rapat Sewa Lahan.....	116
Lampiran 9 Surat Ketentuan Sewa Lahan.....	117
Lampiran 10 Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara	118

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BMN	: Barang Milik Negara
BSG	: Bangun Susun Guna
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KM	: Keputusan Menteri
KSP	: Kerja Sama Pemanfaatan
KSPI	: Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan peraturan apapun itu. Meskipun pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan yang luas namun pemerintah harus tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara umum. Pemerintah yang sesungguhnya merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang dengan memegang teguh prinsip untuk menciptakan kesejahteraan serta ketentraman di dalam masyarakat. Setiap kebijakan dibuat atas dasar kepentingan bersama yang diharapkan mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Karena dalam hal ini kepentingan masyarakat menjadi orientasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Setiap tindakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas diatur oleh pemerintah secara hukum.

Salah satu instansi pemerintah yang ada di Indonesia adalah Distrik Navigasi. Instansi tersebut merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perhubungan. Instansi tersebut diatur langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di Indonesia terdapat beberapa Kantor Distrik Navigasi yang mengatur mengenai berbagai kegiatan kenavigasian serta keselamatan pelayaran di wilayah laut Indonesia. Lembaga tersebut sangat berperan penting dalam terlaksananya kegiatan kenavigasian. Setiap Kantor Distrik Navigasi mempunyai wilayah masing-masing yang menjadi tanggung jawab dari lembaga tersebut. Salah satu Distrik Navigasi yang ada di Indonesia adalah Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Instansi tersebut berada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Blinyu No. 9 Boom Baru, Palembang Sumatera Selatan. Instansi tersebut mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh mengenai wilayah maritim di Kota Palembang. Selain itu instansi tersebut juga bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pelayanan keselamatan

pelayaran yang ada di Kota Jambi dan Kota Pangkal Pinang. Hal tersebut menuntut instansi tersebut harus mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Distrik Navigasi Kelas I Palembang tersebut dibagi menjadi beberapa bidang. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 30 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi Pasal 5. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang tata usaha, bidang operasi dan bidang logistik. Bidang-bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Bidang tata usaha mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk melaksanakan beberapa urusan, yaitu urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Sedangkan bidang operasi mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda yaitu untuk melaksanakan penyusunan rencana, program, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan. Begitu pula halnya dengan bidang logistik yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu yaitu untuk melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan. Dengan pembagian tugas dan fungsi yang dilakukan diharapkan agar lembaga tersebut mampu menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Selain pembagian tugas dan fungsi yang harus dilakukan, hal yang turut mendukung terlaksananya tanggung jawab yang dimiliki Distrik Navigasi Kelas I Palembang adalah

tersedianya barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidang. Barang-barang tersebut diperoleh lembaga tersebut dari anggaran yang telah dikhususkan pemerintah untuk mendukung sebuah lembaga dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, barang-barang tersebut disebut sebagai barang milik negara karena dalam hal ini diperoleh dari anggaran negara. Barang milik negara dalam hal ini dapat berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Namun, meskipun anggaran telah dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan serta pembagian tugas dan fungsi yang telah dilakukan pada setiap bidang yang ada di Distrik Navigasi Kelas I Palembang tidak menjamin lembaga tersebut terbebas dari permasalahan. Seperti halnya lembaga pemerintah lainnya, lembaga tersebut juga mempunyai permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Salah satu permasalahan yang ada di Distrik Navigasi Kelas I Palembang yaitu mengenai barang milik negara. Pemerintah dalam hal ini mencanangkan anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi barang-barang yang diperlukan. Selain itu, tujuan lain dari pemberian dana tersebut bukan hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan barang tersebut. Namun juga mengenai seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh dari barang tersebut. Barang-barang yang diberikan harus mampu memberikan manfaat baik secara luas maupun secara sederhana kepada lembaga tersebut. Peraturan mengenai pemanfaatan barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

b. Kd. Barang : 2.01.03.09.999.6

**KARTU IDENTITAS BARANG
(KIB)**

BIDANG : T A N A H
 KELOMPOK : LAPANGAN
 SUB KELOMPOK : TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI
 SUB-SUB KELOMPOK : Tanah Untuk Bangunan Instalasi Lainnya

NAMA UAKPB : DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG
 KODE UAKPB : 022.04.11.413293.000.KD

I. UNIT BARANG	II. PENGADAAN
1. Luas tanah seluruhnya : 14,085	1. Cara Perolehan : Reklasifikasi Masuk
2. Luas tanah untuk bangunan : 468	2. Dari : -
3. Luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dll) : 0	3. Tgl. Perolehan : 02-01-1987
4. Luas tanah Kosong : 13,617	4. - Harga per M2 : Rp 10,000
5. Lokasi : Propinsi : SUMATERA SELATAN Kota/Kabupaten *) : KOTA PALEMBANG Kecamatan : Sako Kelurahan/Desa *) : Sako Jalan : Sako Raya No. 610 RT/RW/RK : -	- Hrg Seluruhnya : Rp 140,850,000 - Dasar Harga : Harga Perolehan
6. Tanda-tanda Batas Tanah : - Utara : - - Timur : - - Selatan : - - Barat : -	5. Sumber Dana : NON APBN No. DIPA No. Tgl. -
7. Dokumen Kepemilikan : Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q a. Nomor : Sertf Hak Pakai No.15 b. Tanggal : 09 Desember 2009 c. Penerbit : BPN Kota Palcbang	IV. NILAI/ HARGA LAINNYA
	1. Nilai Buku - Harga per M2 : Rp 1,259,000 - Hrg Seluruhnya : Rp 17,733,021,000
	2. Nilai Wajar - Harga per M2 : Rp 0 - Hrg Seluruhnya : Rp 0
	3. NJOP - Harga per M2 : Rp 0 - Hrg Seluruhnya : Rp 0
III. UNIT PENGGUNA	IV. CATATAN PENGISI
1. Nama Unit : DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG	1. Status : Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan
2. Alamat : Sako Raya No. 610	2. Digunakan : Tanah SROP Penerima Kenten oleh/ untuk *)
Disetujui Tgl. : 12-02-2020 Nama pejabat : ADI KARSYAF, S.H., M.H.	Diisi Tgl. : 12-02-2020 Nama : LISSA PARBAWATI
Jab. Struktural : KEPALA DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG	Jabatan : OPERATOR SIMAK BMN
Tanda Tangan dan stempel	Tanda Tangan dan stempel

*) Coret yang tidak perlu

Gambar 1.1 Kartu Inventaris Barang (KIB) Distrik Navigasi Kelas I Palembang

Sumber : Arsip Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Bidang Logistik Distrik Navigasi Kelas I Palembang

Berdasarkan data Kartu Inventaris Barang atau yang biasa disingkat KIB di atas dapat dilihat status lahan mulai dari luas lahan, status penggunaan, status kepemilikan serta harga

dan nilai dari lahan tersebut. Kartu Inventaris Barang (KIB) tersebut mampu menjelaskan mengenai nilai yang sangat tinggi dari barang milik negara tersebut yang merupakan milik Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Dalam hal ini bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara terdapat 5 macam bentuk pemanfaatan. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu pada pasal 5 yang menjelaskan mengenai bentuk Pemanfaatan BMN yang berbunyi :

Bentuk Pemanfaatan BMN berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS/BSG; dan
- e. KSPI

Distrik Navigasi Kelas I Palembang melakukan salah satu bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berupa lahan dengan cara melakukan kegiatan sewa terhadap lahan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, objek sewa barang milik negara meliputi tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. Dalam hal ini lahan merupakan objek sewa barang milik negara yang termasuk dalam kategori tanah. Kegiatan sewa yang dilakukan dalam bentuk penyewaan lahan kepada masyarakat yaitu pedagang yang berjualan di depan lahan tersebut. Kegiatan sewa lahan yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah pendapatan negara melalui pembayaran sewa yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Dengan adanya kegiatan sewa lahan tersebut kedua pihak akan merasa diuntungkan yaitu pedagang dalam hal ini mempunyai tempat yang resmi untuk berjualan tanpa harus merasa cemas akan adanya tindakan yang tidak diinginkan di kemudian

hari. Sedangkan pihak Distrik Navigasi Kelas I Palembang juga akan merasa diuntungkan karena mampu menambah pendapatan negara. Namun, dalam melakukan kegiatan sewa lahan tersebut terdapat kendala yang berupa pedagang yang tidak melakukan pembayaran sewa lahan sejak dibuatnya surat edaran oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Sesuai dengan perjanjian awal sewa, pedagang harus melakukan pembayaran sewa jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali. Surat edaran mengenai perjanjian sewa lahan tersebut telah diberikan sejak april 2019. Dengan demikian sejak dibuatnya perjanjian sewa lahan tersebut maka sudah terhitung 3 kali pembayaran yang harus dilakukan. Perjanjian sewa tersebut dilakukan oleh 6 orang pedagang yang masing-masing setiap tiga bulan harus melakukan pembayaran sewa sebesar Rp 500.000,00. Berdasarkan besaran pembayaran sewa tersebut, maka dapat dilihat kerugian yang dialami oleh pihak Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan kebijakan sewa lahan tersebut. Tujuan utama pembuatan kegiatan sewa lahan tersebut yaitu untuk menambah pendapatan negara terkendala karena pedagang yang tidak melakukan pembayaran sewa lahan.

Distrik Navigasi Kelas I Palembang diharapkan mampu melakukan tindakan terhadap pedagang yang tidak melakukan pembayaran sewa lahan tersebut secara tepat. Hal tersebut dilakukan demi terciptanya keadaan saling menguntungkan diantara kedua pihak. Selain itu pedagang yang melakukan sewa lahan tersebut harus mampu mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat bahwa lahan merupakan asset jangka panjang yang mampu memberikan manfaat secara terus menerus kepada pemiliknya. Selain itu juga, pemanfaatan yang dilakukan tidak hanya fokus pada BMN tersebut. Namun, akan terus dilakukan pada BMN lainnya setelah manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan BMN tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses Implementasi Pelaksanaan Sewa Lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian ini, maka diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian dalam rangka mengembangkan ilmu implementasi kebijakan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan sewa lahan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang agar dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Creswell, John W. 2016. *Research Desugn : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Noviyanti, Laila. 2018. *Implementasi Kebijakan Tarif Sewa RusunawaPenjaringansari II dan III Surabaya*. Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. ([Http://repository.untag-sby.ac.id/1000/8](http://repository.untag-sby.ac.id/1000/8), diakses pada 15 Agustus 2020).
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Gramedia.
- Rose, Bellfana Holy. 2019. *Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Dagang Di Rest Area Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rest Area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. ([Http://repository.radenintan.ac.id/7406/1](http://repository.radenintan.ac.id/7406/1), diakses pada 15 Agustus 2020).
- Soetari, Endang. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolabratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Wijaksono, Raden Tri. 2014. *Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Studi Kasus Di Polresta Kota Pontianak)*. Pontianak : Media Neliti. ([Http://media.neliti.com/media/publications/210206](http://media.neliti.com/media/publications/210206), diakses pada 15 Agustus 2020).